

Terorisme dan Media Massa: Debat Keterlibatan Media

*Nunung Prajarto*¹

Abstract

This article examines the relationship between the government and the media, arguing that both the government and the media workers can create a compact cooperation against terrorism. This can be used for combating the media strategy applied by the terrorist groups which tend to enjoy conflict with violence to spread their propaganda. Matrixing the changing faces of terrorism and the media's role in a conflict helps to facilitate the government in handling terrorism.

Kata-kata kunci:

terorisme; media massa; pemerintah;

Upaya menentang terorisme tak ubahnya berperang melawan kelompok gerilya dengan lawan dan strategi lawan yang tak jelas. Meskipun Ganor (2002: 128-129) membedakan terorisme dan gerilya, substansi aktivitas yang dilakukan untuk kedua istilah itu mengarah pada hal yang sama: pencapaian tujuan politik. Kata teroris dan terorisme kemudian hadir tak lebih sebagai simplifikasi agar terdapat obyek yang diperangi dalam menentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian, kekhawatiran terus saja disepadankan dengan upaya perlawanan terhadap aktivitas terorisme dengan pertanyaan tentang kapan berakhir, mereka di mana dan apa lagi yang akan terjadi?

Gugatan terhadap keberadaan media massa dalam aktivitas menentang terorisme pun kemudian muncul. Satu tuduhan menyebut

¹ *Nunung Prajarto* adalah staf pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL – UGM, Yogyakarta, sedang menyelesaikan PhD pada School of Politics and International Relations, University of New South Wales, Sydney, Australia.

media massa dan teroris memiliki kepentingan yang sama. Pada tingkat ini, teroris menyusun dan memanfaatkan strategi media mereka dan, di lain pihak, media menempatkan kepentingannya pada aktivitas kelompok teroris (Behm, 1991: 239-241). Dalam relasi yang demikian, terorisme kemudian tak boleh sekadar dipandang sebagai bentuk kekerasan belaka, namun wujud dari kombinasi antara propaganda dan kekerasan (Schmid dan de Graaf, 1982: 14). Pada sisi yang lain, nilai manfaat media massa pun diakui dan diterima. Koverasi media terhadap akibat kekerasan terorisme, sebagai contoh, dipandang mampu memicu ketidaksukaan publik terhadap kelompok teroris. Selain itu, terbuka pula peluang bagi pemerintah dan media massa untuk bekerja sama menyusun strategi memerangi terorisme (Behm, 1991: 241-242).

Peta aktivitas terorisme dan peta posisi peran media bila dimatrikskan akan menuntun pada suatu garis relasi antara terorisme dan media massa. Atas dasar ini, pencermatan terhadap media dalam koverasi mereka terhadap terorisme menjadi lebih mudah dilakukan dan memberi manfaat pada pihak-pihak, termasuk pemerintah, yang berupaya menentang terorisme.

Perubahan Wajah dan Interdependensi

Reaksi terhadap koverasi media untuk aktivitas terorisme 9 September di Amerika Serikat, bom Bali, bom bunuh diri Intifada, kekerasan di Chechnya, dan beberapa peledakan bom lainnya di Indonesia pada dasarnya melengkapi kontroversi tentang siapa atau pihak mana yang lebih layak disebut sebagai teroris. Klaim dari sekutu Amerika Serikat cenderung menyebut terorisme dilakukan oleh pihak-pihak yang mengganggu kepentingan Amerika Serikat. Di lain sisi, kelompok yang dituduh melakukan pembelaan diri dan balik menuduh Amerika Serikat beserta sekutunya adalah yang lebih banyak menjalankan "aksi" terorisme. Terlepas dari kontroversi saling tuduh yang tak akan berkesudahan itu, terorisme masa sekarang lebih mudah dipahami sebagai aksi suatu kelompok dengan menggunakan kekerasan untuk menciptakan ketakutan guna mendukung tujuan kelompok itu.²

² Kelompok di sini bisa merujuk pada kelompok manapun; dari skala kecil ke besar, dari individu ke negara.

Kontroversi terhadap koverasi media pun salah satunya berakar dari pertanyaan tentang media massa sebagai bagian atau malah salah satu kelompok itu.

Senada dengan Behm (1991: 239-242), dua kutub debat tentang koverasi media disampaikan pula oleh Norris, Kern dan Just (2003a: 3-5). Mereka mengulang pertanyaan tentang (1) media massa berada satu posisi dengan kelompok teroris dan koverasi media massa justru memicu munculnya aksi-aksi kekerasan yang lain, serta sebaliknya (2) media massa berada di samping pemerintah dalam upaya memerangi terorisme, yang di antaranya dilakukan dengan dukungan politik dan dukungan kebijakan keamanan. Namun berbeda dengan Behm, kontroversi posisi dan koverasi media massa oleh Norris, Kern dan Just kemudian dikaji lebih dalam lagi. *Framing analysis* (analisis terhadap pilihan topik, sumber berita, bahasa dan gambar) yang mereka lakukan mengantar pada tiga hal pokok: *news frame* tentang keamanan nasional, bahaya dalam negeri dan ancaman luar; persepsi tentang *world terrorism* yang berlebihan, dan kekuatan pengaruhnya terhadap opini publik. Gambaran serupa diperoleh pula dari studi Schaefer (2003: 93-94) serta Nacos dan Torres-Reyna (2003: 135).

Munculnya istilah *world terrorism* menegaskan gambaran kabur tentang pelaku dan aktivitas terorisme seperti yang diangkat dalam awal tulisan ini. Selain itu, *world terrorism* juga melengkapi perubahan wajah terorisme dari lima (Behm, 1991: 235-236) menjadi tujuh. *World terrorism*, sebagai wajah keenam, menyertai *state-sponsored terrorism*, *faction-sponsored terrorism*, *crime-related terrorism*, *narcoterrorism* dan *issue-motivated terrorism*, sebelum muncul wajah ketujuh, ke depan kita sebut dengan *group-suspected terrorism*,³ yang dalam versi Amerika Serikat dikaitkan antara lain dengan jaringan al Qaeda dan Jamaah Islamiyah. Lebih lanjut tentang perang melawan terorisme yang digaungkan Amerika Serikat dan persoalan *public relations* bagi Pentagon karena tuduhan balik *media-ized* oleh al Qaeda secara kritis didiskusikan oleh Louw (2003: 211-230).

³ Keberadaan kelompok teroris ini lebih dimunculkan oleh kecurigaan pihak lain dan bukan atas klaim sebagai kelompok teroris yang bertanggung jawab atas aktivitas terorisme yang mereka lakukan. Akses media terhadap kelompok jenis ini relatif lebih terbatas dibandingkan dengan akses yang sama yang diberikan oleh kelompok teroris yang menyatakan diri mereka secara terang-terangan.

Media seakan abai dengan beragam wajah terorisme ini. Bagi media, terorisme adalah terorisme dan teroris adalah teroris. Pemberitaan yang berakibat pada munculnya ketakutan psikis terhadap kejahatan pidana disejajarkan dengan pemberitaan yang berakibat pada rasa terteror di masyarakat oleh peledakan dan ancaman peledakan bom.⁴ Selain itu, media massa cenderung menampilkan liputannya tentang rangkaian peristiwa aksi teror dan akibatnya dibandingkan liputan tentang upaya penumpasan terorisme. Laporan investigasi, dalam bahasa Behm (1991: 240), tak lebih dari simbiosis terorisme dan media, yang berujung pada propaganda kelompok teroris, eksklusivitas akses media ke kelompok teroris dan uang. Kegeraman Paul Johnson, seperti dikutip Behm (1991: 240), ditunjukkan dengan *"Most journalists are scoundrels. They can't tell the difference between hard news and scandal, except that they like scandal because it makes money. They should all be locked up."*

Kecurigaan terhadap adanya interdependensi teroris dan media ditegaskan oleh Giessmann (2002: 134-136). Menurutny, kelompok teroris mencari perhatian media untuk sebisa mungkin mendapatkan penerimaan publik. Kelompok teroris kerap mengusung sensasi – sebagai nilai berita – yang mereka manipulasi untuk tujuan propaganda. Media massa, lebih lanjut, menerima bentuk simbiosis ini demi untuk mendapatkan gambar-gambar yang menarik dan berita-berita yang mengejutkan serta menjadi *leading newspaper* terhadap kompetitornya. Padahal idealnya, menurut Giessmann, media massa memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk membatasi persebaran terorisme dengan pemberitaan yang lebih bersandar pada kesadaran moral dan reportase yang dipilah-pilahkan.

Isu tentang simbiosis antara media dan teroris melahirkan sejumlah isu lain dalam kaitannya dengan pertentangan antara keamanan nasional dan kebebasan pers,⁵ serta isu tentang masalah obyektivitas, kebenaran dan kebutuhan khalayak dalam pemberitaan

⁴ Besarnya efek pemberitaan media tetap bisa diperdebatkan, namun akibat dari replikasi pemberitaan tentang terorisme pada rakyat Amerika Serikat mengarah pada keseragaman perubahan persepsi (lihat Norris, Karren dan Just, 2003: 4).

⁵ Jika ini tidak dipakai sekadar untuk menutupi rendahnya kemampuan jaminan keamanan dalam negeri.

media. Terhadap permasalahan ini, Chaudhary (2002: 158-164) menegaskan perlunya tanggung jawab media dalamewartakan terorisme. Menurutnya, obyektivitas yang terkait dengan akurasi, fakta, keseimbangan dan cara pandang tak bias harus diikuti pula dengan kebijakan tentang fakta yang harus dilaporkan, diabaikan atau bahkan dilupakan secara total. Mengutip Robert M. Steele, Chaudhary membenahi logika pencarian dan penceritaan 'kebenaran' yang harus didasari dengan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan agar berita yang disusun akurat secara faktual dan otentik secara kontekstual serta kemampuan untuk mempelajari situasi dan bertindak secara cepat demi kepentingan publik. Bila obyektivitas dan kebenaran bisa disepahami, maka gugatan terhadap kepentingan keamanan nasional dan kebebasan pers bisa diminimalkan karena adanya kesepahaman yang lain dalam masalah akses dan kerahasiaan (dalam tarik menarik antara media dan pemerintah).

Dalam kesimpulannya tentang tanggung jawab media, Chaudhary (2002: 163) menyatakan, *"Media thus have a dual responsibility in wartime: to seek the truth and report it as fully, factually, and fairly as possible; and to ensure that the competitive aspect of the nature of their business does not lead to a violation of legitimate security concerns."*

Harus disadari, kesimpulan yang diberikan Chaudhary di atas lebih didasari hubungan antara media dan reportase terorisme paska-kejadian 9 September. Kesimpulan lain berkemungkinan muncul bila *event* yang dikaji lain serta sudut pandang diubah dari kepentingan negara ke kepentingan pihak-pihak lain yang ikut "tersandung" dalam terorisme.

Terorisme: Lima Pihak

Setidaknya, terdapat lima pihak yang repot dan direpotkan oleh aktivitas terorisme. Dalam pembajakan pesawat terbang, misalnya, kelima pihak ini tergambar jelas. Pemerintah suatu negara yang dijadikan target terorisme, masyarakat yang secara psikis akan terganggu keamanannya, korban atau sandera di dalam pesawat, kelompok pelaku terorisme (teroris), serta media massa yang melakukan koverasi terhadap peristiwa pembajakan itu. Kelima pihak ini akan berada pada suatu siklus antara menimbulkan rasa takut, efek ketakutan, dan upaya peniadaannya.

Kebanyakan analis kemudian mencoba melihat hubungan antara pemerintah dan teroris, media dan teroris serta pemerintah dan media. Penekanan terhadap analisis diberikan pada substansi terorisme serta komunikasi politik dengan pengeksploitasian kekerasan. Rebakan dari penekanan ini lebih jauh menjangkau target-target aksi teroris, korban, opini publik, dukungan dan kecaman, serta upaya-upaya negatif pencarian pembenar untuk aktivitas teror (Crelinsten, 1989: 311).

Terhadap hal-hal terakhir di atas, munculnya publisitas bagi kelompok teroris dipandang lebih utama daripada "keberhasilan" mereka melakukan teror. Keberadaan kelompok teroris dengan sasaran pada kepentingan politik tertentu berada pada level pemberian *warning* bagi pemerintah suatu negara agar tidak bersikap sewenang-wenang terhadap kelompok atau anggota kelompok masyarakat tertentu. Terorisme konvensional seperti ini sekadar memberi "pesan" kepada target utamanya.

Namun demikian, kasus-kasus terorisme *massive* yang terjadi pada periode belakangan cenderung mengubah pandangan tentang maksud pencarian publisitas. Aksi terorisme melangkah lebih jauh dengan tujuan untuk pemaksaan kehendak dan ajang balas dendam. *Credo* di dalam kelompok teroris pun seakan menjawab kalimat ancaman dari sejumlah agen rahasia (Mossad, sebagai contoh) yang cenderung hitam atau putih. "Kalau kalian bukan bagian dari pemecahan masalah, kalian adalah bagian dari persoalan."

Dalam versi Amerika Serikat, aksi terorisme dunia mengancam kepentingan Amerika Serikat. Ini mencakup serangan terhadap instalasi militer dan perwakilan diplomatik Amerika Serikat di negara-negara tertentu. Pemerintah Amerika Serikat yang terganggu dengan hal ini kemudian merasa layak melakukan pembelaan diri, pembersihan ancaman, dan melakukan penyerangan balik. Negara-negara lain yang memiliki hubungan dengan Amerika Serikat pun ikut direpotkan, baik oleh aktivitas terorisme yang terjadi maupun saat melayani kepentingan Amerika Serikat. Hasil persidangan kasus bom Bali, bila layak dicontohkan, membuktikan repotnya Indonesia (sebagai lokasi pemboman) dan Australia (salah sasar warga negaranya) hanya karena kelompok teroris berkehendak melakukan perhitungan dengan Amerika Serikat.

Dengan demikian, target politik kelompok teroris tidak lagi sekadar pemerintah suatu negara secara tunggal. Terpikirkan atau tidak, aktivitas terorisme melahirkan banyak kerepotan bagi sejumlah negara, meskipun negara-negara lain sesungguhnya tidak masuk dalam kategori sasaran. Korban pemboman berkewarganegaraan lain, area rusak di negara bukan target utama dan penumpang dari beragam bangsa yang ikut dalam pesawat yang ditabrakkan mencerminkan – selain pemerintah yang ditarget kelompok teroris– banyaknya pemerintah negara lain yang harus menanggung repot.

Perkecualian bisa diberikan pada aktivitas kelompok teroris dari *faction-sponsored terrorism* yang biasanya beroperasi di dalam suatu negara tempat mereka tinggal. Dengan beragam motif dan jenis pelaku –memisahkan diri sebagai wilayah merdeka dan tentara desersi, misalnya–, aktivitas terorisme tak banyak menuntut campur tangan banyak negara. Korban, rasa takut yang menyebar dan kerusakan yang terjadi dalam hal ini bersifat lokal. Kekerasan politik yang terjadi di Irlandia Utara dapat dipakai sebagai contoh dalam hal ini (Knox, 2001: 182-183). Hal yang mirip dapat dilihat di Aceh dalam konflik antara Gerakan Separatis Aceh dan TNI/Polri. Hanya saja harus dicatat, *faction-sponsored terrorism* ini tetap berpeluang merepotkan banyak pemerintah bila aktivitas mereka melibatkan komunitas internasional, mendapat dukungan dari sejumlah negara serta mengakibatkan munculnya korban berkewarganegaraan lain, termasuk pekerja media dari institusi media luar negeri.

Terlepas dari banyaknya pemerintah negara yang direpotkan oleh ulah teroris, ketakutan di dalam masyarakatlah yang lebih terasa meskipun hal ini kurang mendapat koverasi yang cukup dari media. Rasa terteror melahirkan kegaman dan keengganan untuk beraktivitas secara biasa. Pembajakan pesawat yang terjadi menyebabkan penumpang meragukan sistem keamanan bandar udara. Peledakan bom menjadikan masyarakat was-was terhadap bangunan tempat kerja. Wajah tak jelas kelompok teroris menjelma sebagai hantu yang susah dibuktikan keberadaannya namun menakutkan.

Lebih parah lagi, banyak pihak yang lantas ikut memanfaatkan rasa terteror di dalam masyarakat ini untuk kepentingan mereka sendiri. Aktivitas terorisme muncul sebagai pemicu teror-teror amatir lanjutan.

Motivasi bisa dikaitkan dengan keisengan atau keuntungan ekonomi. Kerugian di dalam masyarakat akibat rantai panjang aktivitas terorisme inilah yang jarang mendapat liputan media. Terlalu fokus pada aktivitas terorisme utama menyebabkan media kurang sensitif kalau tidak sekadar mengungkapnya di permukaan masalah-masalah sosial yang diakibatkan. Pada sisi ini, pemfokusan pada aktivitas terorisme utama menggarisbawahi kesuksesan kelompok teroris dalam menerapkan strategi media mereka demi tujuan publisitas atau propaganda.

Studi dan analisis terhadap rantai panjang terorisme pun nyaris tak pernah dilakukan. Kerugian sosial yang luas luput dari kajian karena studi tentang hal ini tetap menggunakan aksi terorisme utama sebagai pijakan fenomenanya. Bisa diperdebatkan kemudian, solusi terhadap persoalan terorisme di masyarakat yang banyak terpinggirkan oleh prioritas kajian pada segitiga hubungan teroris, pemerintah dan media massa.

Individu korban aktivitas terorisme, meskipun masuk dalam liputan media, sangat jarang yang kemudian dijadikan fokus kajian. Trauma yang dialami sandera pembajakan pesawat, korban luka peledakan bom dan saksi peristiwa, sebagai contoh, nyaris tak tersentuh para peneliti. Kondisi korban aksi teroris lebih banyak dimunculkan sebagai berita media massa dan ditampilkan dalam gambar-gambar atau rekaman gambar yang semakin memperbesar efek ketakutan masyarakat; sekaligus memperpanjang kehendak pelaku aksi dalam membuat situasi *chaos*.

Lima kategori korban aksi teroris bisa disebutkan di sini. *Pertama*, pelaku aksi terorisme yang karena keyakinan, kelalaian dan janji-janji tertentu ikut terbunuh. Bom bunuh diri cenderung mematikan pelakunya. Pembajak pesawat terbang yang putus asa dan berubah nekat sering kali memilih mati bersama sanderanya. Operasi penumpasan atau pembebasan yang dilancarkan aparat keamanan berkemungkinan besar mengorbankan pelaku aksi terorisme.

Kedua, korban mati yang memang dijadikan target aksi kelompok teroris. Dari pejabat pemerintahan, perwakilan diplomatik hingga ke masyarakat berkebangsaan tertentu yang tak disukai kelompok teroris adalah orang-orang yang berpotensi besar terkorbankan oleh aksi terorisme. Kudeta terhadap suatu pemerintah yang berkuasa, bila pelaku

kudeta kemudian dianggap menjalankan aksi terorisme dan tidak ada *deal* politik di kemudian hari, cenderung melahirkan korban mati sesuai target aksi teroris.

Ketiga, korban lain yang ikut meninggal meskipun mereka lebih tepat disebut sebagai korban ikutan. Salah kalkulasi terhadap radius dan kekuatan ledakan acap mengorbankan orang-orang yang tidak masuk dalam kategori sasaran. Korban-korban ikutan semacam ini lebih ditentukan oleh “nasib jelek” berada di sebuah tempat atau kebetulan berada di lokasi sekitar target kelompok teroris. Terhadap korban-korban ini, media massa banyak melakukan liputan.

Keempat, korban luka –baik ditargetkan atau sekadar terkena efek– yang tingkat luka dan traumanya bervariasi. Mereka tak ubahnya sebagai korban ranjau yang meledak yang mengakibatkan luka kecil, luka parah, kehilangan anggota badan, masa depan yang terputus dan trauma atas kejadian yang membutuhkan penanganan panjang. Tergolong pada kategori korban ini adalah saksi peristiwa yang selamat, yang biasanya masih harus melayani serbuan media (sebagai sumber berita) dan interogasi petugas keamanan.

Dalam beda yang tipis, kelima, keluarga dan teman korban aksi terorisme dapat dikategorikan sebagai korban tak langsung. Penderitaan yang dialami korban langsung aksi terorisme, pada tingkat sosial masyarakat tertentu, membawa kerugian pada sejumlah korban tak langsung ini. Kerugian yang diderita korban tak langsung ini akan semakin besar bila korban langsungnya adalah kepala keluarga sebagai penyangga kekuatan ekonomi.

Di lain pihak, kelompok teroris dalam menjalankan aksinya nyaris tak pernah berpikir tentang rentang korban di atas. Secara riil kelompok teroris hanya akan berpikir pada kepentingan tujuan politik, publisitas yang teraih, pengakuan eksistensi, efek teror, terbelahnya opini publik, dan sebisa mungkin dukungan terhadap aksi mereka. Hal ini tentunya berbeda dengan reaksi sebagian besar anggota komunitas internasional saat aksi terorisme ditayangkan di sejumlah stasiun televisi pada kasus 9 September di Amerika Serikat dulu.

Bila aktivitas terorisme konvensional (sebut misalnya Brigade Merah dan organisasi Baader Meinhof) cenderung dimengerti sebagai proyek merugi, aksi-aksi teror yang terjadi belakangan justru

menegaskan upaya pencapaian tujuan mereka. Tidak banyak lagi cerita tentang teroris selalu kalah, pembajakan pesawat terbang selalu berujung pada kematian teroris dan tuntutan pembajak tak satu pun dipenuhi. Jaringan terorisme internasional, seperti yang dituduhkan Amerika Serikat, justru menari-nari di atas kebingungan kepentingan keamanan Amerika Serikat dan kekhawatiran berlebihan warga negara Amerika Serikat (Norris, Kern dan Just, 2003a: 4; dan Norris, Kern dan Just, 2003b: 285).

Kelompok teroris dengan kesadaran tinggi atas strategi media juga mampu memilih waktu yang paling tepat agar aktivitas mereka tersiar secara luas. Menit-menit menjelang *breaking news* dan sasaran dengan *media exposure* tinggi seolah masuk dalam perhitungan cermat kelompok teroris. Dapat dikatakan, strategi media kelompok teroris mampu melakukan belanja media berefek besar dengan biaya mendekati nol. Tersirat, inilah kemurahhatian media yang paling tinggi terhadap suatu peristiwa yang menggunakan jasa media.

Lebih dari itu, manajemen opini publik tergarap dengan baik oleh kelompok teroris. Belahan opini memang sebagian besar mengarah pada kecaman terhadap tindak kejam aksi terorisme atas dasar *moral judgements* (Rusciano, 2003: 159). Di satu sisi, ini bersifat *counter productive* terhadap upaya pencarian publisitas dan dukungan. Celaan sejumlah pemimpin negara dan penunjukan simpati pada korban aksi menandakan tidak adanya dukungan terhadap aksi kelompok teroris. Di sisi yang lain, kelompok teroris mampu pula menggiring opini publik untuk cenderung membenarkan aksi mereka, 'yang dilakukan adalah untuk membungkam arogansi Amerika Serikat'. Opini publik minoritas bisa menyetujui tindakan teroris dan memberi peneguhan tersendiri bila sebelumnya kelompok minoritas ini memiliki rasa tak puas pada Amerika Serikat. Gambaran umum yang ada, "sekaranglah waktunya duel maut antara Amerika Serikat dan kelompok teroris."

Media massa, karena fungsi atau memang bidang aktivitasnya, pada gilirannya tampil dan turut berperan. Bisa dikatakan, aktivitas terorisme lebih dikenal, dipahami dan disikapi karena sebaran liputan media. Kecepatan, percepatan dan cakupan luas tebar informasi tentang terorisme bergantung pada kerja institusi media. Pada tingkat yang sama, masyarakat mengikuti perkembangan peristiwa terorisme dengan

bergantung pada media juga. Atau dengan kata lain, media massa menciptakan dua ketergantungan: publisitas bagi teroris dan koverasi untuk masyarakat.

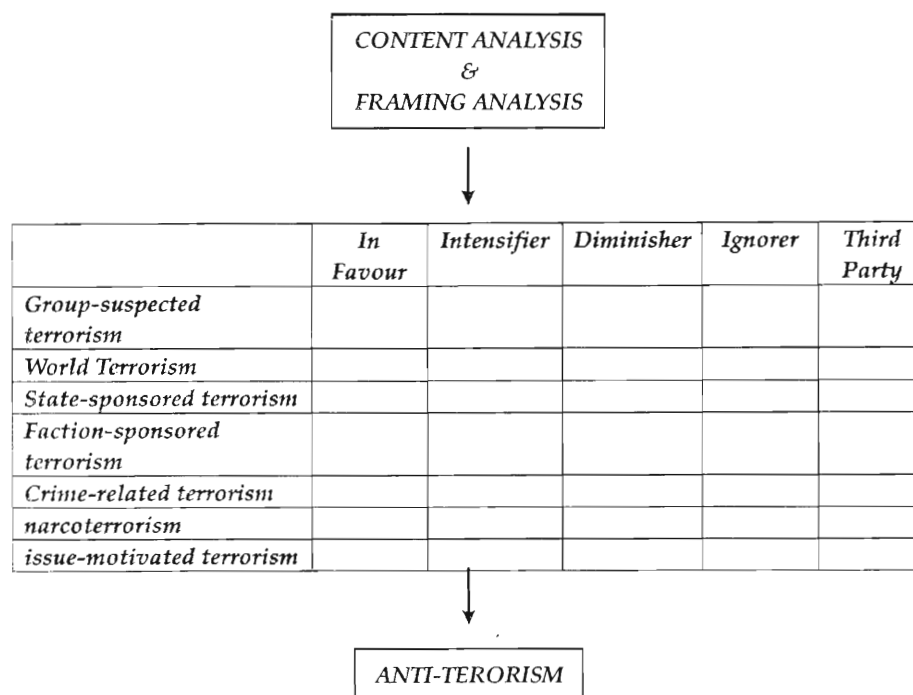
Bila aktivitas terorisme dipahami sebagai konflik yang terjadi antara kelompok teroris dan pihak yang ditarget, maka posisi media berita dalam konflik itu bisa digambarkan sebagai berikut. Secara umum, media berita idealnya hanya bertindak sebagai *story teller* terhadap peristiwa itu (Prajarto, 1993: 10). Penceritaan dengan menjawab formula 5W+H, pertimbangan piramida terbalik, nilai berita dan kelayakan muat cukup untuk mengantar sebagai *story teller* dengan memenuhi standar profesional jurnalistik. Setidaknya kehadiran media massa dalam liputan tentang terorisme tetap dipandang sebagai *the third party*.

Persoalan meruyak ketika media massa mengambil peran tertentu dalam konflik antara kelompok teroris dan sasaran yang ditarget. Dengan keberpihakan tertentu, seperti yang diungkapkan Behm (1991: 239-242) serta Norris, Kern dan Just (2003a: 3-5), media massa cukup layak untuk menuai hujatan. Sepanjang pekerja media tak mampu menjaga prinsip kejujuran, verifikasi dan independensi serta tidak sekadar menjaga netralitas (Kovach dan Rosenstiel, 2001: 121-123) maka sifat partisan media sulit untuk terbantah. Lebih lanjut, layanan media untuk kepentingan publik semakin jauh dari kenyataan.

Di luar masalah keberpihakan, keterlibatan media terhadap konflik antara kelompok teroris dan target sasaran mereka dapat diklasifikasikan ke dalam perannya sebagai *intensifier*, *diminisher* (Arno, 1984: 3-14) dan *ignorer*. Nampaknya, terjerembab ke dalam klasifikasi semacam inilah yang banyak terjadi pada media massa saat melakukan koverasi terorisme dan bukan seperti yang diungkapkan Behm, Norris, Kern dan Just dengan masalah keberpihakan media.

Gambaran tentang lima pihak yang "repot" dan "direpotkan" oleh aktivitas terorisme di atas bisa dipakai untuk menengarai institusi-institusi media yang secara sadar atau tidak telah dimanfaatkan kelompok teroris demi tujuan propaganda mereka. Model pencermatan dengan metode *content analysis* dan *framing analysis* terhadap item berita terorisme membuka peluang untuk melihat kecenderungan institusi media dalam pewartaan peristiwa terorisme.

Selanjutnya, bila suatu institusi media dapat ditengarai posisinya (lihat matriks berikut), akan lebih mudah bagi pihak-pihak yang menghendaki hilangnya aktivitas terorisme untuk meninggalkan media yang berkecenderungan menyukai konflik atau lebih jauh lagi berpihak pada kelompok teroris. Secara reflektif, media massa dapat pula melihat ke dalam dirinya tentang pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya kepada publik.



Pemerintah – Media – Terorisme

Aktivitas terorisme, terlebih peristiwa 9 September, mau tidak mau banyak dikaji dengan perspektif hubungan internasional (Hill, 2002: 257). Tata aturan internasional, dampak transnasional dan dilema etik kebijakan luar negeri, misalnya, dipakai untuk melihat peluang

menentang aktivitas terorisme serta jaringannya. Sisi kaji komunikasi, untuk tujuan yang sama, menempatkan peristiwa akibat ulah teroris ini di dalam segitiga hubungan pemerintah–media–terorisme. Secara parsial, hubungan itu bisa lebih dicermati dengan melihat hubungan pemerintah dan terorisme, media dan terorisme, serta pemerintah dan media (Crelinsten, 1989: 312-320).

Bila kecurigaan terhadap adanya simbiosis antara terorisme dan media banyak digugat secara negatif, tinjauan terhadap hubungan antara pemerintah dan media berpeluang untuk melahirkan suatu strategi dalam perlawanan terhadap terorisme. Hal yang perlu disadari, identifikasi terhadap karakter isi liputan dan kecenderungan media mutlak harus dikenali dengan baik oleh pemerintah. Hal ini penting agar pemerintah memiliki strategi media yang tepat sebagai *counter* terhadap strategi media kelompok teroris, setelah pemerintah sendiri menentukan strateginya (non-strategi media) untuk menghadapi teroris.

Berdasar pengalaman internasional, perlawanan terhadap terorisme bukanlah suatu hal yang mudah. Namun dalam keyakinan Behm, pemerintah dan media dapat membentuk suatu tujuan bersama (*common objectives*) untuk memperkecil resiko kehidupan masyarakat akibat ulah teroris. Menurutnya, pemerintah memfokuskan perhatian pada upaya meniadakan kekerasan serta melindungi kehidupan dan media menyusun laporan atas dasar semua fakta secara *both* atau *multi-sided coverage*. Akan lebih ideal lagi bila sembilan elemen jurnalisme yang disebutkan Kovach dan Rosenstiel dapat dilakukan oleh pekerja media.

Indonesia dapat mengadopsi strategi yang dipakai pemerintah Australia untuk melakukan perlawanan terhadap terorisme. Elemen-elemen strategi dalam pendukung tujuan bersama pemerintah dan media yang mengarah pada tersusunnya strategi media pemerintah adalah *public communication policies and guidelines, the incorporation of media response and incident management strategies, media skills and techniques*, serta *physical control* (Behm, 1991: 242-245). Pijakan utama dalam penerapan strategi ini adalah legitimasi media untuk mendapatkan dan mewartakan informasi sebanyak mungkin kepada publik dalam suatu kesetimbangan antara kebutuhan publik dan kerahasiaan tertentu yang harus tetap terjaga. Pijakan berikutnya

terletak pada upaya agar kelompok teroris dan pendukungnya tidak mendapatkan informasi tertentu dalam kategori rahasia bagi penanganan insiden dan rekoveri keamanan. Dalam batas tertentu, kredibilitas pemerintah untuk penanganan kasus dan pemulihan keadaan harus diupayakan agar memenangkan dukungan publik.

Jika pemerintah secara tegas menyatakan diri tidak akan melakukan kompromi terhadap aksi kekerasan, hubungan pemerintah dan institusi media perlu diperjelas dengan menyatakan hal-hal berikut. *Pertama*, pemerintah membutuhkan kerja sama media untuk menangani kasus terorisme. *Kedua*, level kontak antara pemerintah dan institusi media bisa dibatasi hanya pada level editor. *Ketiga*, reportase media terhadap kasus terorisme harus dievaluasi efeknya dan respon dalam pelayanan media dinyatakan sebagai bagian integral dari manajemen kasus.

Strategi media yang dijalankan pemerintah di atas kiranya akan lebih mudah dilaksanakan bila pematrikskan antara peran media dalam suatu konflik dan ragam wajah terorisme digunakan sebagai dasar. Pemerintah, lewat pejabat yang berwenang dalam masalah keamanan, dapat menegaskan strateginya kepada sejumlah institusi media yang dari analisis matriks dipandang banyak bermasalah. Namun satu hal yang harus tetap dipegang, seperti halnya kelompok teroris yang membutuhkan media untuk publisitas aksi mereka, pemerintah pun membutuhkan kerja sama media untuk menunjang perlawanannya terhadap kekerasan terorisme.***

Daftar Pustaka

- Behm, A.J. (1991). 'Terrorism: Violence Against the Public and the Media: The Australian Approach.' *Political Communication and Persuasion*. Vol 8. hal. 233-246.
- Chaudhary, Anju Grover. (2002). 'The Media's Responsibility in Reporting Terrorism.' *Media Asia Communication Quarterly*. Vol 20 No. 3. hal. 158-164.

- Crelinsten, Ronald D. (1989). 'Terrorism and the Media: Problems, Solutions and Counterproblems.' *Political Communication and Persuasion*. Vol. 6 hal. 311-339.
- Ganor, Boaz. (2002). 'Defining Terrorism: Is One Man's Terrorist Another Man's Freedom Fighter?' *Media Asia Communication Quarterly*. Vol 20 No. 3. hal. 123-133.
- Giessmann, Hans J. (2002). 'Media and the Public Sphere: Catalyst and Multiplier of Terrorism?' *Media Asia Communication Quarterly*. Vol 20 No. 3. hal. 134-136.
- Hill, Christopher. (2002). '11 September 2001: Perspectives from International Relations.' *International Relations*. Vol. 16 No. 2. hal. 257-262.
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. (2001). *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Pantau.
- Knox, Colin. (2001). 'The "Deserving" Victims of Political Violence: "Punishment" Attacks in Northern Ireland.' *Criminal Justice*. Vol 1 No. 2. hal. 181-199.
- Louw, P. Eric. (2003). 'The War Against Terrorism.' *Gazette: The International Journal for Communication Studies*. Vol 65 No. 3. hal. 211-230.
- Nacos, Brigitte L. dan Oscar Torres-Reyna. (2003). 'Framing Muslim-Americans Before and After 9/11.' Dalam Pippa Norris, Montague Kern dan Marion Just (eds.). *Framing Terrorism: The News Media, the Government and the Public*. New York: Routledge. hal. 133-157.
- Norris, Pippa; Montague Kern; dan Marion Just. (2003a). 'Framing Terrorism.' Dalam Pippa Norris, Montague Kern dan Marion Just (eds.). *Framing Terrorism: The News Media, the Government and the Public*. New York: Routledge. hal. 3-23.

- Norris, Pippa; Montague Kern; dan Marion Just. (2003b). 'The Lessons of Framing Terrorism.' Dalam Pippa Norris, Montague Kern dan Marion Just (eds.). *Framing Terrorism: The News Media, the Government and the Public*. New York: Routledge. hal. 281-301.
- Prajarto, Y.A. Nunung. (1993). *Media Berita dalam Sebuah Konflik*. Yogyakarta: FISIPOL-UGM.
- Rusciano, Frank Louis. (2003). 'Framing World Opinion in the Elite Press.' Dalam Pippa Norris, Montague Kern dan Marion Just (eds.). *Framing Terrorism: The News Media, the Government and the Public*. New York: Routledge. hal. 159-181.
- Schaefer, Todd M. (2003). 'Framing the US Embassy Bombings and September 11 Attacks in African and US Newspaper.' Dalam Pippa Norris, Montague Kern dan Marion Just (eds.). *Framing Terrorism: The News Media, the Government and the Public*. New York: Routledge. hal. 93-111.
- Schmid, Alex P. dan Janny de Graaf. (1982). *Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the Western News Media*. Beverly Hills: Sage Publications.